

Daftar Isi

| No. | Judul Berita | Media Sumber | Page |
|-----|--|--|------|
| 1. | ESDM Siapkan Sanksi untuk Eksportir Batu Bara yang Tak Pakai HBA | ekonomi.bisnis.com | 2 |
| 2. | Eramet Mau Investasi Nikel Buat Baterai EV, Gandeng Danantara | bloombergtechnoz.com | 4 |
| 3. | Selain Efek HBA, Ini Alasan Ekspor Batu Bara RI Rawan Anjlok 2025 | bloombergtechnoz.com | 6 |
| 4. | Injak Usia ke-44, Bukit Asam Hadirkan Inovasi Berbasis Batu Bara hingga Energi Baru Terbarukan | liputan6.com | 9 |
| 5. | PT Timah Kembangkan Kemitraan Tambang dengan Masyarakat dan BUMDes | katadata.co.id | 12 |

ESDM Siapkan Sanksi untuk Eksportir Batu Bara yang Tak Pakai HBA

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mengenakan sanksi kepada eksportir yang belum menggunakan harga batu bara acuan (HBA) sebagai acuan transaksi penjualan emas hitam di pasar global.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, kementerian belum mengenakan sanksi lantaran saat ini masih proses transisi kebijakan. Namun, dia memastikan ke depan akan ada sanksi khusus.

"Sementara ini sampai saat ini belum [disanksi]. Tapi ke depan iya. Sanksinya iya, akan ada sanksi," ucap Tri di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (4/3/2025).

Adapun, kewajiban penggunaan HBA sebagai acuan transaksi ekspor diatur dalam Keputusan Menteri (Kepmen) Menteri ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batu Bara.

Dalam beleid tersebut, pengusaha batu bara wajib melakukan penjualan batu bara yang diproduksi sesuai harga patokan batu bara (HPB). HPB yang dihitung menggunakan HBA, menjadi harga batas bawah penjualan batu bara.

Meski sanksi belum diatur dalam Kepmen tersebut, Tri menuturkan eksportir tetap harus memenuhi kewajiban pembayaran royalti dan pajak yang didasarkan pada perhitungan HBA. Dengan kata lain, eksportir yang menjual batu bara dengan harga di bawah HPB perlu membayar pajak dan royalti yang lebih tinggi dari harga jual aktual batu bara.

"Tapi yang jelas perusahaan yang tidak melaksanakan itu kan dia pajaknya kena yang sesuai dengan HPB [harga patokan batu bara] atau HBA," kata Tri.

Aturan mengenai kewajiban menggunakan HBA untuk ekspor batu bara berlaku 1 Maret 2025. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga penjualan komoditas mineral logam dan batu bara di pasar global maupun dalam negeri.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menginginkan agar eksportir batu bara menggunakan HBA sebagai acuan transaksi ekspor. Hal ini lantaran penjualan ekspor batu bara Indonesia masih menggunakan harga acuan yang disepakati dengan pembeli dari negara lain.

Menurut Bahlil, hal ini cukup merugikan. Sebab, terkadang batu bara Indonesia dihargai lebih murah dibandingkan negara lain.

"Nah, kita ini kan harus punya ide independensi, harus punya nasionalisme. Jangan harga batu bara kita ditentukan oleh orang lain harganya rendah. Aku enggak mau itu," kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/2/2025).

Oleh karena itu, dia pun menilai menjadikan HBA sebagai acuan ekspor merupakan keniscayaan. Dengan begitu, harga jual batu bara Indonesia di pasar internasional lebih menguntungkan.

"Jadi kita sekarang membuat HBA adalah agar harga kita juga mempunyai harga yang baik di pasar global," tuturnya. Editor : Denis Riantiza Meilanova

Sumber: ekonomi.bisnis.com

Eramet Mau Investasi Nikel Buat Baterai EV, Gandeng Danantara

PERUSAHAAN asal Prancis, Eramet, menyatakan akan berinvestasi di proyek hilirisasi nikel untuk baterai kendaraan listrik atau *electric vehicle* (EV), dengan menggandeng Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

“Eramet menyatakan keinginan untuk berinvestasi lebih lanjut di Indonesia dengan mitra lokal pada sektor *critical minerals*. Eramet juga berkeinginan mencari peluang investasi, terutama di hilirisasi dengan BPI Danantara,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto keterangan resmi, Selasa (4/3/2025).

Airlangga mengatakan Eramet telah beberapa kali menyampaikan komitmennya kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung hilirisasi nikel dan memproduksi baterai EV, khususnya di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Dalam kaitan itu, pemerintah Indonesia menyambut baik usulan tersebut guna mendukung percepatan transisi energi di Indonesia.

“Untuk menjamin komitmen industri hijau tersebut, lokasi industri dimaksud nantinya dapat ditempatkan berdekatan dengan sumber energi hidro guna menjamin penggunaan energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” ujar Airlangga.

Airlangga menegaskan komitmen antara Indonesia dan Eramet dapat membangun kemitraan yang kuat dalam mempercepat transformasi industri hijau Indonesia dan mendukung rantai pasok global.

“Kemitraan Indonesia dan Eramet memiliki potensi besar untuk mendorong inovasi, memperkuat industri nikel dan baterai kendaraan listrik, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi kedua pihak,” ucap Airlangga.

Informasi Cadangan

CEO Eramet Christel Bories menyampaikan saat ini Eramet masih memerlukan informasi mengenai ketersediaan bahan baku yang diperlukan untuk pelaksanaan produksi di Indonesia.

Sebagai tindak lanjut, Airlangga dan Christel Bories menyepakati perlunya penyusunan peta jalan dan estimasi kapasitas produksi. Hal tersebut akan dijadikan pertimbangan pemerintah Indonesia dalam pemberian dukungan kepada Eramet sebagai upaya pengembangan ekosistem nikel di Indonesia.

Direktur Eramet Indonesia Bruno Faour sebelumnya pernah mengatakan Eramet telah memutuskan untuk mencoba mematuhi standar Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), yang dikenal sebagai standar yang paling tinggi dalam aktivitas pertambangan di dunia.

Pada Juli tahun lalu, Eramet tengah dalam proses untuk mematuhi IRMA untuk pertambangan PT Weda Bay Nickel, yang merupakan perusahaan patungan antara Eramet, Tsingshan Group, dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk (ANTM) atau Antam.

“Jadi, dengan adanya kemauan dari pemerintah, ditambah komitmen dari beberapa pemain besar seperti Eramet, saya kira ini membuat saya optimistis terhadap kemampuan Indonesia untuk menjawab tantangan ini,” kata Faour dalam wawancara bersama *Bloomberg Technoz*. (mfd/wdh)

Sumber: [bloombergtechnoz.com](https://www.bloombergtechnoz.com)

Selain Efek HBA, Ini Alasan Ekspor Batu Bara RI Rawan Anjlok 2025

ANALIS komoditas berpandangan permintaan batu bara Indonesia pada 2025 berpotensi stagnan, khususnya akibat penurunan impor dari China. Kondisi ini diperparah dengan adanya kewajiban penggunaan harga batu bara acuan (HBA) dalam kegiatan ekspor komoditas tersebut.

Vice President, Head of Marketing, Strategy and Planning PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menjelaskan permintaan batu bara China yang diestimasikan stagnan tahun ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.

Konsumsi batu bara China —yang juga negara tujuan ekspor terbesar batu bara RI— diperkirakan hanya tumbuh 0,02% secara anual menjadi 4,94 miliar ton pada 2025, sedangkan India tumbuh 3,65% menjadi 1,36 miliar ton, berdasarkan data International Energy Agency (IEA).

“Adanya *demand* [China] yang mengalami stagnasi serta kebijakan pengenaan harga batu bara untuk ekspor dengan HBA akan cenderung memberikan tekanan untuk eksportir,” katanya saat dihubungi, Selasa (4/3/2025).

Adapun, Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batubara China memproyeksikan impor batu bara Negeri Panda kemungkinan akan menurun pada 2025 menjadi 525 juta ton dari rekor tertinggi pada 2024 sebanyak 542,7 juta ton, yang naik 14,4% dari realisasi 2023 sejumlah 474,42 juta ton.

“Jika melihat data ekspor batu bara pada 2024, China masih mendominasi destinasi ekspor [batu bara RI], dengan porsi 43,4% atau sebanyak 241,7 juta ton [dari total ekspor batu bara RI tahun lalu] dan disusul oleh India sebesar 27% atau sebanyak 110 juta ton,” ujarn Oktavianus.

Meski demikian, dia menilai masih ada peluang bagi Indonesia untuk mendorong ekspor batu bara melalui diplomasi perdagangan dengan anggota aliansi Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

Hanya saja, potensi ekspor batu bara ke anggota BRICS yang lain dinilai tetap belum bisa memberikan kepastian bahwa kinerja ekspor komoditas tersebut akan terjaga pada tahun ini.

Lesunya permintaan batu bara China juga diutarakan oleh Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia/Indonesian Coal Mining Association (APBI/ICMA) Gita Mahyarani.

Dia menyebut kondisi itu tecermin dari nihilnya permintaan batu bara saat momentum perayaan Imlek. China disebut lebih memilih menggunakan stok batu bara yang dimiliki di dalam negerinya sendiri, alih-alih mengimpor dari Indonesia.

“Sudah [terjadi penurunan permintaan]. Biasanya Imlek itu ada kenaikan untuk permintaan, [sekarang] *enggak*. *Boro-boro* stagnan; *enggak* ada,” ujarnya saat dihubungi.

“Karena mereka sudah pintar, mereka *bikin* stok, mereka *nyetok nih*. Habis ini kan musim kering *nih*. Selesai kan musim dingin. Mereka menambang [batu bara] lagi. Pakai saja punyanya mereka. *Enggak* usah impor ya mereka.”

Ditambah dengan adanya aturan baru yang mewajibkan penjualan batu bara Indonesia mengacu pada HBA, para importir di luar negeri pun disebut akan membutuhkan waktu lagi untuk menyesuaikan kontrak transaksi mereka dengan aturan baru dari Pemerintah RI.

“Karena untuk memperkenalkan HBA sebagai basisnya ke *buyer* ini pastinya butuh waktu dan saat ini kondisinya *market* lagi turun. Kondisi *market* lagi turun ini yang kita khawatirkan justru [membuat] mereka mengalihkan [permintaan] ke tempat lain. Walaupun kita masih kita masih percaya bahwa orang akan mencari batu bara Indonesia,” jelasnya.

Menurut catatan APBI/ICMA, volume ekspor batu bara RI ke China yang sekitar 300 juta ton per tahun sejatinya hanya mencakup 5% dari kebutuhan domestik China.

Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batubara China sebelumnya juga melaporkan beberapa perusahaan China mungkin akan berusaha untuk membatalkan atau merundingkan ulang kontrak jangka panjang yang telah disepakati akibat penentuan HBA sebagai standar harga ekspor batu bara Indonesia.

Fenwei Energy Information Service Co dalam sebuah catatan mengatakan penggunaan HBA dalam kegiatan ekspor secara signifikan menaikkan harga batu bara Indonesia, dan hal itu dapat menghapus keuntungan perdagangan dan menurunkan minat dari pembeli China.

“Salah satu masalahnya adalah harga batu bara sering berubah, tetapi HBA hanya diperbarui sebulan sekali. Indonesia mencoba mengurangi keterlambatan tersebut dengan mengubah jadwal tersebut, memperbarui [HBA] pada tanggal 1 dan 15 setiap bulan ke depannya, menurut peraturan pemerintah,” katanya.

Kementerian ESDM menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 72.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara per 1 Maret 2025.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut aturan tersebut secara otomatis berlaku terhadap mandatori penggunaan HBA untuk kegiatan ekspor batu bara.

Tri mengatakan aturan HBA dibuat lantaran pemerintah tidak ingin harga batu bara Indonesia dijual murah ke luar negeri. “Tujuan kita adalah supaya kita lebih eksis lah,” kata Tri ditemui di kantornya Jumat (1/3/2025). -- Dengan asistensi Mis Fransiska Dewi (wdh)

Sumber: [bloombergtechnoz.com](https://www.bloombergtechnoz.com)

Injak Usia ke-44, Bukit Asam Hadirkan Inovasi Berbasis Batu Bara hingga Energi Baru Terbarukan

HARI Ulang Tahun (HUT) ke-44 PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mengusung tema "Menata Ulang, Menyulut Perubahan". Tema ini merupakan ajakan kepada seluruh insan Bukit Asam untuk bergerak maju, melakukan perbaikan, dan transformasi ke arah yang lebih baik guna memberikan Energi Tanpa Henti.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk (PTBA), Arsal Ismail mengungkapkan, Menata Ulang berarti seluruh insan Bukit Asam harus mampu melihat kembali setiap langkah yang telah dilalui, dan menata ulang strategi untuk menghadapi tantangan di masa depan. Menyulut Perubahan adalah selalu bersiap beradaptasi atas setiap perubahan.

"Di usia ke-44 ini, sudah saatnya PTBA tidak hanya menjadi penonton perubahan, tetapi menjadi pelopor perubahan," ungkapnya.

"Mari bersama-sama kita ciptakan terobosan yang tidak hanya memberikan nilai tambah bagi perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap kemajuan bangsa Indonesia," jelas Arsal.

Arsal mengungkapkan, pada momen peringatan HUT ke-44, PTBA harus melangkah lebih maju dan melompat lebih tinggi, bersama-sama mewujudkan transformasi bisnis perusahaan dalam rangka menghadirkan Energi Tanpa Henti bagi negeri.

"Dengan semangat Menata Ulang dan Menyulut Perubahan, Bukit Asam terus berinovasi dan beradaptasi agar dapat berkembang secara berkelanjutan, mendukung swasembada energi, pembangunan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Hadirkan Inovasi dari Batu Bara

PTBA menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk menciptakan peningkatan nilai tambah batu bara, salah satunya dengan Badan Riset & Inovasi Nasional (BRIN) dalam konversi batu bara menjadi Artificial Graphite dan Anode Sheet untuk bahan baku baterai.

Peluncuran perdana (soft launching) pilot project Artificial Graphite dan Anode Sheet telah dilakukan di Kawasan Industri Tanjung Enim pada 15 Juli 2024.

Artificial Graphite merupakan bahan utama untuk pembuatan Anoda. Adapun Anode Sheet adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi (kutub positif), salah satu komponen penting untuk baterai.

Produk hilir batu bara lainnya yang juga sedang dikembangkan PTBA adalah asam humat. Penelitian dan pengembangan batu bara kalori rendah menjadi asam humat dilakukan PTBA bersama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM).

Peluncuran Prototype (purwarupa) asam humat telah dilakukan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) Peranap, Indragiri Hulu, Riau, pada 12 Desember 2024. Prototype tersebut selanjutnya akan dikembangkan untuk menuju pilot project.

Asam humat merupakan zat organik (pupuk) yang dapat membantu menyuburkan dan meningkatkan kualitas tanah dengan cara memperbaiki struktur, menjaga kelembaban, dan membantu tanaman menyerap nutrisi lebih baik.

Hadirkan Energi Baru Terbarukan

PTBA melakukan diversifikasi bisnis ke energi baru terbarukan (EBT) dan memiliki sejumlah lahan bekas tambang untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Di antaranya adalah lahan pasca tambang Ombilin (Sumatera Barat) dan Tanjung Enim (Sumatera Selatan). Potensi PLTS di lahan pasca tambang tersebut mencapai 200 Megawatt-peak (MWp).

Perusahaan sejauh ini telah membangun PLTS di Bandara Soekarno-Hatta bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II (Persero), yang sudah beroperasi penuh sejak Oktober 2020. PLTS tersebut berkapasitas maksimal 241 kilowatt-peak (kWp) dan terpasang di Gedung Airport Operation Control Center (AOCC).

Tak hanya dengan Angkasa Pura II, PTBA bekerja sama dengan Jasa Marga Group untuk pengembangan PLTS di jalan-jalan tol. PLTS berkapasitas 400 kWp di Jalan Tol Bali-Mandara telah selesai dibangun dan diresmikan pada 21 September 2022.

Perusahaan pun bekerja sama dengan PT Semen Baturaja Tbk (SMBR) dalam pembangunan PLTS berkapasitas 23,07 kWp yang mencapai tahap COD pada Juni 2023.

Sumber: liputan6.com

PT Timah Kembangkan Kemitraan Tambang dengan Masyarakat dan BUMDes

PT TIMAH TBK terus berupaya mengembangkan tata kelola pertambangan bijih timah dengan menerapkan pola kemitraan yang melibatkan masyarakat secara langsung.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik pertambangan yang sesuai dengan regulasi dan prinsip good mining practice.

"PT Timah terus beradaptasi untuk menghadirkan pola kemitraan penambangan yang melibatkan masyarakat langsung," ujar Departement Head Corporate Communication PT Timah, Anggi Siahaan, di Pangkalpinang, Selasa (5/3).

Sebelumnya, PT Timah bersama Kejaksaan Agung telah menggelar rapat koordinasi terkait rencana tata kelola kerja sama kemitraan dalam jasa penambangan komoditas timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Rapat ini melibatkan pemerintah daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan tujuan menghadirkan pola kemitraan yang lebih baik. Sebagai langkah awal, pola kemitraan penambangan ini akan diterapkan di Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah.

"PT Timah berkomitmen menjalankan program ini dengan mengedepankan aspek keberlanjutan serta menggandeng berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat setempat," ujarnya.

Pelibatan Masyarakat dan BUMDes

Kemitraan ini memungkinkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kelompok masyarakat yang memenuhi regulasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan. PT Timah akan menambang sendiri dengan melibatkan masyarakat lokal dalam aktivitas operasional.

"Untuk program kemitraan tambang dengan pelibatan masyarakat langsung ini, kami akan mencobanya di Batu Beriga. PT Timah akan menambang sendiri dengan melibatkan masyarakat lokal," kata Anggi.

Setiap alat produksi ponton yang beroperasi di Perairan Beriga akan melibatkan dua tenaga kerja lokal. Formulasi tenaga kerja dalam alat produksi ini mencakup masyarakat setempat, operator PIP, dan pengawas. PT Timah memastikan bahwa pola ini akan dijaga agar berjalan dengan baik, kondusif, dan saling memperkuat.

Saat ini, PT Timah juga tengah mendorong BUMDes Beriga untuk memenuhi persyaratan, seperti memiliki Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP), agar dapat bermitra secara langsung dengan perusahaan.

"Kami sedang mendampingi BUMDes dalam proses perizinan, aspek teknis, serta penerapan standar keselamatan dan lingkungan," ujarnya.

Dengan memenuhi regulasi, nantinya mereka bisa bermitra langsung dengan PT Timah. Program ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat serta meningkatkan pendapatan desa.

Kontribusi terhadap Lingkungan dan Ekonomi

Pola kemitraan ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan peran masyarakat tidak hanya dalam kegiatan penambangan, tetapi juga dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, pencegahan kecelakaan tambang, dan peningkatan kontribusi terhadap negara.

Dengan adanya kerja sama sinergis antara perusahaan dan masyarakat, PT Timah optimistis dapat menciptakan ekosistem pertambangan yang lebih berdaya guna dan berkelanjutan bagi semua pihak.

Dia berharap program ini diharapkan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dengan adanya pola kemitraan ini, masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap kegiatan ekonomi berbasis pertambangan.

"Tanpa harus melakukan aktivitas tambang ilegal yang berisiko bagi lingkungan dan keselamatan," ujar Anggi. Reporter: Antara

Sumber: katadata.co.id